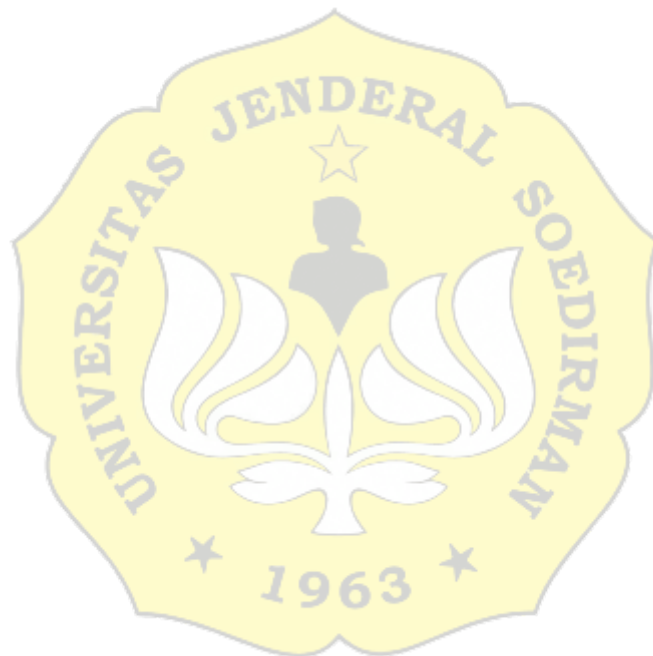




DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2014. Analisis Pertumbuhan serta Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. *Research Paper*. Slide Share.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Devianingrum, Eldita, Sri Rustiyaningsih, Theresia Purbandari. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 01.No.02 hal.37-44.
- Faryadi, Albar Wajid. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Studi Kasus : Deputi Bidang Investigasi).
- IAAO. 2010. *Standard on Property Tax Policy*, Chicago :International Association of Assessing Officers..
- IRRV. 2008. *Principles for Local Government Finance*, London : Institute of Revenue Rating and Valuation.
- KBBI.2015. Efisiensi.<http://kbbi.web.id/efisiensi> (diakses 24 September 2015)
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya untuk memperkokoh Basis Perkonomian*. *Jurnal Ekonomi Rakyat* Vol II No.1, Juni Hal 1-11
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.2011
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi XXII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setiawan, Wahyudi & Ahsan Daroini. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Bank Tempat Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi*. Vol.2 No.3 hal 45-47.
- Slack, Enid, Richard M Bird. 2014. *The Political Economy of Property Tax Reform Working Paper on Fiscal Federation No, 18*. OECD Publishing..
- Vlassenko, Irena 2001. Evaluation of The Efficiency and Fairness of British, French and Swedish Property Tax System *Journal of Property Management*. Vol.19 Iss 5. Hal 384-416. Emerald Insight.2013.
- Von Haldenwang, Christian 2015. *The Political Cost of Local Revenue Mobilisation : Decentralisation of The Local Property Tax in Indonesia*. Research Paper. SSRN

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2012. Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 44 Tahun 2012. Tentang Juklak Perda
Nomor 15 tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

